

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>The Role of ASEAN through ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFS) in Achieving Indonesia's Food Security</i>	R. Miryanti dkk. (2023)	Membahas peran AIFS/SPA-FS bagi ketahanan pangan Indonesia; relevan untuk menganalisis implementasi program.	Ini berbentuk <i>proceeding</i> /studi kualitatif (refleksi/kajian kebijakan) dan cakupan lebih deskriptif regional serta tidak selalu menyediakan evaluasi empiris tingkat nasional/daerah. (Unsoed)
2	Menuju ketahanan pangan indonesia berkelanjutan 2025: Tantangan dan penanganannya	Achmad Suryana (2014)	Menyediakan konteks kebijakan nasional dan strategi (arah kebijakan, target, tantangan) yang relevan untuk menganalisis bagaimana program AIFS/SPA-FS bisa diadaptasi/diimplementasikan di Indonesia.	Bersifat tinjauan kebijakan / strategi (kualitatif, deskriptif), bukan evaluasi empiris program implementasi atau studi kasus lapangan.
3	Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Utama Produksi Pupuk NPK Menggunakan Fuzzy Economic Order Quantity (Studi Kasus: PT Petrokimia Gresik)	Karina Endriana (2023)	Menyediakan wawasan operasional/teknis (manajemen persediaan, optimasi stok) yang penting jika penelitian Anda menilai aspek rantai pasok/ketahanan input dalam implementasi AIFS/SPA-FS.	Fokus mikro/operasional (manajemen persediaan di pabrik pupuk) sangat teknis dan kuantitatif (metode Fuzzy EOQ), bukan kajian kebijakan AIFS/SPA-FS.
4	Pengaturan Investasi dalam Rangka Ketahanan Pangan di ASEAN	D. Delfiyanti (2023).	Membahas aspek investasi & kebijakan yang relevan untuk implementasi SPA-FS/AIFS cocok bila penelitian Anda melihat aspek investasi/kemitraan.	Kecenderungan pembahasan pada aspek legal/aturan investasi, bukan evaluasi langsung implementasi program teknis.
5	Kerjasama Ketahanan Pangan Indonesia-ASEAN melalui Kerangka AIFS (Studi	D. Aldirianto (2023).	Analisis hubungan kebijakan nasional (impor beras) dengan kerangka AIFS/SPA-FS relevan untuk melihat dampak AIFS terhadap kebijakan perdagangan pangan Indonesia.	Fokus kasus impor beras (kebijakan perdagangan) → berguna untuk bagian kebijakan tetapi mungkin tidak membahas semua

	Kasus: Kebijakan Impor Beras 2018–2022			komponen implementasi SPA-FS
6	<i>The gains of coordination — When does regional cooperation for food security make sense?</i>	L. Kornher & M. Kalkuhl (2019).	Membahas keuntungan/kondisi di mana kerjasama regional (seperti AIFS) efektif untuk ketahanan pangan relevan untuk landasan teoretis aspek koordinasi kebijakan regional.	Analisis teoretis/ekonometrik tentang manfaat koordinasi regional; cakupannya bersifat teoretis/model ekonomi, bukan studi empiris khusus Indonesia.
7	<i>Food security in ASEAN: progress, challenges and future</i>	P. Sundram (2023).	Ulasan menyeluruh tentang perkembangan dan tantangan ketahanan pangan ASEAN termasuk AIFS atau SPA-FS 2021–2025; sangat relevan untuk konteks regional yang mempengaruhi implementasi di Indonesia.	Review regional (ASEAN-wide) yang menyorot isu lintas negara; berguna untuk kerangka konseptual dan rekomendasi tetapi bukan studi lapangan Indonesia secara spesifik.
8	<i>ASEAN responses to COVID-19 for assuring food security</i>	P.P.S. Teng dkk. (2021).	Membahas implementasi mekanisme regional (termasuk AIFS-relevan tindakan) saat krisis → relevan jika Anda menilai peran AIFS/SPA-FS pada situasi guncangan/pandemi.	Fokus pada respons COVID-19 (konteks darurat). Metode campuran/tinjauan; bisa dipakai sebagai studi kasus tentang ketahanan dan respon darurat.
9	<i>Food Security Governance: bibliometric mapping and insights</i>	B. Desker / ERIA (2013).	Menyajikan framework kebijakan regional dan mekanisme operasional AIFS / SPA-FS relevan untuk memahami struktur program dan institusi yang mempengaruhi implementasi.	Biasanya berbentuk policy paper/think-tank (ERIA) atau review; tidak selalu berisi data primer di tingkat Indonesia. Cocok untuk landasan kebijakan / tinjauan literatur.
10	<i>Transaction cost analysis of ASEAN food security (case & implications)</i>	R.E. Pinasthika (2024).	Menyorot hambatan ekonomi dan transaksi yang mempengaruhi efektivitas inisiatif AIFS / SPA-FS berguna jika penelitian Anda memasukkan aspek ekonomi/koordinasi pasar.	Pendekatan lebih kuantitatif/ekonomi (<i>transaction cost</i>) jika penelitian Anda bersifat kebijakan/implementasi, dapat dipadu dengan studi kualitatif.

Studi literatur pertama yang berjudul *The Role of ASEAN through ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFS) in Achieving Indonesia's Food Security.*, Penelitian ini mengulas bagaimana kerangka AIFS digunakan ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia di tengah situasi yang semakin kompleks mulai dari perubahan iklim, ketergantungan pada komoditas impor, hingga tekanan harga pangan global. Miryanti dkk. menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN, memiliki posisi strategis dan sekaligus tantangan besar dalam menjaga kestabilan pangan nasional. AIFS hadir sebagai wadah koordinasi yang membantu negara-negara anggota menyelaraskan kebijakan serta memperkecil risiko disrupsi pasokan pangan. Studi ini menyoroti bahwa keberadaan AIFS membuat sistem perencanaan dan antisipasi krisis pangan menjadi lebih terstruktur karena setiap negara tidak lagi bekerja secara terpisah.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah peran AFSIS sebagai sistem informasi pangan kawasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa akses terhadap data regional memungkinkan Indonesia memantau dengan lebih akurat kondisi produksi dan distribusi pangan di negara tetangga. Informasi tersebut sangat membantu dalam perumusan kebijakan domestik, terutama ketika terjadi potensi kelangkaan, lonjakan harga, atau penurunan produksi. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa mekanisme peringatan dini melalui AFSIS memberi ruang bagi Indonesia untuk mempersiapkan respons yang lebih cepat dan efektif sebelum tekanan pangan berdampak signifikan pada masyarakat.

Penelitian ini juga mengangkat peran cadangan pangan regional seperti APTERR yang menjadi bagian dari dukungan operasional AIFS. Melalui mekanisme ini, Indonesia dapat mengakses cadangan beras kawasan ketika berhadapan dengan risiko kekurangan pasokan, baik akibat anomali cuaca maupun gangguan perdagangan internasional. Studi ini menggarisbawahi bahwa bentuk solidaritas regional ini memberikan jaminan tambahan bagi stabilitas pangan nasional dan menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika kawasan.

Kesimpulannya, studi ini menekankan bahwa AIFS bukan hanya kerangka kerja sama formal, tetapi instrumen nyata yang mempengaruhi strategi pangan Indonesia. Melalui koordinasi kebijakan, pertukaran informasi yang lebih baik, serta dukungan cadangan pangan kawasan, Indonesia memperoleh manfaat langsung dalam memperkuat ketahanan pangan nasionalnya. Relevansi penelitian ini terletak pada pemahaman tentang bagaimana implementasi AIFS berjalan di tingkat praktik, bukan hanya konsep, dan bagaimana kerangka tersebut membantu Indonesia mengurangi kerentanan terhadap berbagai ancaman pangan.

Kemudian studi literatur kedua berjudul **Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya (Suryana, 2014)**. Dalam tulisan ini, Suryana memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi dasar ketahanan pangan Indonesia menjelang 2025 dengan menekankan bahwa persoalan pangan tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi dan kapasitas produksi nasional. Ia memaparkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius seperti alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat, produktivitas yang stagnan, serta ketergantungan pada impor untuk beberapa komoditas kunci. Tantangan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut pengelolaan ruang, kebijakan harga, akses pasar, dan kualitas infrastruktur pendukung. Pendekatan Suryana sangat penting karena memberikan konteks domestik yang kuat untuk memahami mengapa kerja sama regional seperti AIFS dan SPA-FS diperlukan.

Selain menyoroti tantangan struktural, studi ini juga membahas berbagai aspek kebijakan yang dianggap krusial untuk memperbaiki kondisi pangan Indonesia. Misalnya, Suryana menekankan pentingnya penguatan lembaga pangan nasional, terutama peran pemerintah dalam menyediakan cadangan pangan serta memastikan distribusi yang merata ke seluruh wilayah. Ia juga menyoroti perlunya integrasi kebijakan antar sektor, karena masalah ketahanan pangan tidak akan terselesaikan jika pertanian berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan sektor perdagangan, transportasi, tata ruang, dan industri. Pendekatan lintas sektor inilah yang dianggap Suryana sebagai fondasi bagi ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga menempatkan Indonesia dalam konteks regional dan global, bahwa ketergantungan pada impor tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga risiko strategis. Dalam tulisan tersebut, Suryana memberi perhatian pada perlunya Indonesia memiliki strategi mitigasi risiko, termasuk memperkuat cadangan pangan dan memperbaiki sistem logistik nasional agar lebih siap menghadapi fluktuasi harga dunia atau gangguan pasokan. Walaupun tidak membahas AIFS secara langsung, pemikiran ini sangat relevan dengan kerja sama ASEAN, karena menunjukkan bagaimana program regional dapat memperkuat kapasitas domestik melalui koordinasi dan dukungan lintas negara.

Dari keseluruhan pembahasannya, studi ini menjadi landasan penting karena memberikan potret jelas mengenai kondisi fundamental yang harus dibenahi Indonesia untuk mencapai stabilitas pangan. Analisis Suryana membantu menjelaskan mengapa implementasi AIFS dan SPA-FS menjadi signifikan, sebab kedua program tersebut menawarkan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan nasionalnya melalui pendekatan kolektif ASEAN. Dengan kata lain, studi ini memberi konteks domestik yang memperjelas hubungan antara

tantangan internal Indonesia dan pentingnya kerja sama regional dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang.

Selanjutnya pada studi literatur ketiga berjudul **Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Utama Produksi Pupuk NPK Menggunakan Fuzzy Economic Order Quantity (Endriana, 2023)**. Penelitian yang dilakukan Endriana berfokus pada aspek teknis dalam pengelolaan persediaan bahan baku pupuk NPK di PT Petrokimia Gresik, sebuah perusahaan yang menjadi salah satu pemasok utama pupuk bagi sektor pertanian Indonesia. Melalui penerapan metode *Fuzzy Economic Order Quantity* (Fuzzy EOQ), penelitian ini mencoba menjawab persoalan klasik dalam industri pupuk: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan pasokan bahan baku dengan biaya penyimpanan yang semakin tinggi dan ketidakpastian permintaan dari pasar. Endriana menunjukkan bahwa metode fuzzy mampu memberikan estimasi kebutuhan persediaan yang lebih fleksibel, terutama ketika perusahaan berhadapan dengan variabel yang sulit diprediksi seperti fluktuasi harga dan keterlambatan pengiriman bahan baku.

Dalam studi ini, konsep Fuzzy EOQ digunakan untuk memperhitungkan ketidakpastian secara lebih realistis dibandingkan metode EOQ konvensional. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kesalahan dalam memproyeksikan kebutuhan bahan baku dapat berdampak langsung pada proses produksi pupuk, yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan pupuk bagi petani. Endriana menekankan bahwa efisiensi dalam pengelolaan persediaan bukan hanya soal menekan biaya internal perusahaan, tetapi berkaitan erat dengan rantai pasok pangan nasional. Keterlambatan distribusi pupuk dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian, sehingga membuat penelitian ini relevan dalam konteks ketahanan pangan secara lebih luas.

Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana penerapan teknologi perhitungan berbasis fuzzy dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih adaptif. Dengan mempertimbangkan variabel seperti tingkat permintaan pupuk yang tidak stabil, durasi pengiriman bahan baku yang berubah-ubah, serta fluktuasi biaya penyimpanan, model fuzzy dinilai mampu menghasilkan jumlah pemesanan optimum yang lebih akurat. Hasil penelitian memperlihatkan peningkatan efisiensi manajemen stok dan penurunan biaya operasional, sebuah temuan yang penting ketika industri pupuk berada pada tekanan tinggi akibat dinamika pasar global dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional.

Kaitan penelitian ini terlihat dari perannya sebagai pendukung stabilitas pangan melalui sektor hulu, yaitu ketersediaan pupuk. Meskipun studi ini tidak membahas AIFS atau SPA-FS secara langsung, temuan Endriana memberikan gambaran bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan regional dan pemerintah pusat, tetapi juga oleh efektivitas

manajemen operasional di tingkat industri. Dengan kata lain, stabilitas produksi pertanian sebagai komponen penting ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada efisiensi industri yang berada di belakangnya termasuk industri pupuk. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap rantai pasok mikro seperti ini tetap relevan dalam melihat implementasi kebijakan pangan yang lebih besar.

Pada studi literatur keempat berjudul **Pengaturan Investasi dalam Rangka Ketahanan Pangan di ASEAN**, Penelitian Delfiyanti berfokus pada bagaimana kebijakan dan regulasi investasi dapat berperan sebagai fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Studi ini berangkat dari pemahaman bahwa upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada produksi domestik, tetapi juga membutuhkan dukungan investasi yang kuat dan terkoordinasi. Delfiyanti menelaah berbagai aturan dan kerangka hukum yang mengatur investasi lintas negara, terutama di sektor pertanian dan infrastruktur pangan, lalu menghubungkannya dengan kebutuhan kawasan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh. Pendekatan ini memberikan sudut pandang berbeda karena melihat ketahanan pangan bukan hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga terkait erat dengan dinamika kebijakan dan komitmen politik antarnegara.

Dalam pembahasannya, Delfiyanti menunjukkan bahwa investasi berperan sebagai katalis untuk mendorong modernisasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi, penguatan jaringan logistik, serta pembangunan fasilitas penyimpanan dan distribusi. Studi ini menekankan bahwa negara-negara ASEAN yang memiliki regulasi investasi lebih terbuka dan stabil, cenderung lebih siap dalam menghadapi ancaman terhadap ketahanan pangan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investor asing maupun domestik. Tanpa regulasi yang jelas dan konsisten, proses pembangunan infrastruktur pertanian dapat terhambat, sehingga memperlambat upaya peningkatan kapasitas produksi pangan kawasan.

Delfiyanti juga melihat bagaimana kerja sama investasi intra-ASEAN berpotensi mendukung implementasi AIFS dan SPA-FS. Melalui kemitraan investasi, negara-negara anggota dapat saling melengkapi keunggulan masing-masing, seperti berbagi teknologi pertanian, modal finansial, dan pengalaman dalam pengelolaan pangan. Penelitian ini menilai bahwa integrasi kebijakan investasi dapat memperkuat kemampuan ASEAN menghadapi krisis, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang. Hal ini relevan terutama dalam konteks meningkatnya tekanan global seperti perubahan iklim dan volatilitas harga pangan internasional.

Kaitan penelitian ini terlihat jelas pada aspek pendukung implementasi AIFS dan SPA-FS. Meskipun tidak secara langsung membahas mekanisme teknis kedua program tersebut, Delfiyanti memberikan gambaran bahwa keberhasilan kerja sama regional tidak mungkin dicapai tanpa dukungan struktur investasi yang kuat. Perspektif ini memperkaya pemahaman bahwa ketahanan pangan Indonesia maupun kawasan tidak hanya ditentukan oleh strategi produksi dan distribusi, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan iklim investasi yang stabil dan mendorong modernisasi sektor pangan. Dengan demikian, studi ini memberikan dasar teoretis yang penting untuk memahami dimensi ekonomi-politik dari kerja sama pangan ASEAN.

Studi literatur kelima berjudul **Kerjasama Ketahanan Pangan Indonesia–ASEAN melalui Kerangka AIFS (Studi Kasus: Kebijakan Impor Beras 2018–2022)**, Penelitian Aldirianto mengangkat hubungan antara kebijakan impor beras Indonesia dan implementasi kerangka AIFS, dengan fokus pada periode 2018–2022 ketika Indonesia menghadapi fluktuasi produksi domestik dan tekanan harga yang cukup tinggi. Studi ini menawarkan gambaran konkret tentang bagaimana kebijakan nasional tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh dinamika kerja sama di tingkat ASEAN. Aldirianto menilai bahwa keputusan impor beras dalam periode tersebut tidak hanya berdasarkan kebutuhan domestik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pasokan beras di kawasan, cadangan pangan regional, serta koordinasi dengan negara-negara ASEAN lain yang menjadi mitra strategis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia semakin terhubung dengan sistem pangan kawasan.

Dalam analisisnya, Aldirianto menyoroti bagaimana kerangka AIFS memfasilitasi koordinasi kebijakan antara negara-negara anggota ASEAN. Melalui mekanisme pertukaran informasi, pertemuan rutin antar kementerian pertanian, serta integrasi data melalui AFSIS, Indonesia dapat menilai situasi pangan regional secara lebih akurat sebelum mengambil keputusan impor. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan impor bukan hanya respons spontan terhadap kekurangan pasokan, tetapi bagian dari strategi yang mempertimbangkan stabilitas harga di pasar domestik dan kondisi produksi negara tetangga. Hal ini memperlihatkan bahwa kerja sama regional memberikan ruang bagi Indonesia untuk merencanakan kebijakan perdagangan pangan dengan lebih hati-hati.

Studi ini juga membahas bagaimana AIFS berperan sebagai penghubung antara diplomasi pangan dan kebutuhan domestik Indonesia. Dalam konteks kebijakan impor beras, keberadaan cadangan pangan ASEAN seperti APTERR memberi Indonesia opsi tambahan ketika berhadapan dengan ketidakpastian produksi dalam negeri. Aldirianto menunjukkan

bahwa melalui mekanisme tersebut, Indonesia bisa menjalin kesepakatan impor yang lebih terkoordinasi sekaligus menghindari persaingan tidak sehat dengan negara ASEAN lain dalam mendapatkan pasokan beras pada saat produksi global menurun. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana kerja sama kawasan dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap guncangan pasokan dan fluktuasi harga.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bagaimana AIFS berperan dalam pengambilan keputusan kebijakan pangan strategis Indonesia. Temuan Aldirianto relevan dengan penelitian ini karena memberikan contoh konkret implementasi AIFS pada tingkat kebijakan nasional, bukan hanya pada level konsep atau kerangka kerja. Studi ini membantu memperjelas hubungan antara kerja sama ASEAN dan dampaknya terhadap stabilitas pangan Indonesia, terutama ketika negara harus mengambil keputusan sulit seperti impor beras demi menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Literatur keenam berjudul *The Gains of Coordination — When Does Regional Cooperation for Food Security Make Sense?*. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar: kapan sebenarnya kerja sama regional dalam bidang ketahanan pangan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi negara-negara anggotanya? Kornher dan Kalkuhl meninjau berbagai bentuk koordinasi kebijakan pangan di kawasan-kawasan dunia, termasuk ASEAN, untuk melihat kondisi apa saja yang membuat kerja sama semacam ini lebih efektif dibandingkan kebijakan nasional yang berdiri sendiri. Dalam analisisnya, mereka menunjukkan bahwa kerja sama regional menjadi penting ketika negara-negara menghadapi risiko yang sifatnya lintas batas, seperti krisis harga pangan global, gangguan cuaca ekstrem, atau penurunan produksi yang terjadi secara bersamaan di beberapa negara. Studi ini menempatkan koordinasi sebagai instrumen mitigasi risiko, bukan sekadar formalitas kebijakan.

Dalam pembahasannya, penulis menekankan bahwa koordinasi kebijakan pangan memberikan keuntungan terbesar ketika negara-negara anggota memiliki ketergantungan yang tinggi satu sama lain, terutama dalam perdagangan komoditas pokok. Melalui model analisis ekonomi, penelitian ini memperlihatkan bahwa mekanisme seperti cadangan pangan bersama, pertukaran data produksi, pembatasan ekspor darurat, serta harmonisasi regulasi dapat mengurangi volatilitas harga dan menghindari kepanikan pasar. Bagi kawasan seperti ASEAN, yang sebagian besar anggotanya saling mengandalkan pasokan beras dan komoditas pangan lain, temuan ini sangat relevan karena memperlihatkan bahwa kebijakan regional dapat menjadi penyangga ketika pasar global sedang bergejolak.

Penelitian ini juga menekankan bahwa efektivitas kerja sama regional sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antarnegara dan kualitas institusi regional yang menjalankan koordinasi tersebut. Kornher dan Kalkuhl menemukan bahwa tanpa mekanisme yang jelas dan komitmen politik yang stabil, kerja sama pangan berisiko berhenti pada tingkat deklaratif dan tidak menghasilkan tindakan nyata. Mereka menekankan pentingnya institusi yang mampu menyediakan data akurat, memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan, dan memfasilitasi respons cepat ketika terjadi ancaman pangan. Dalam konteks ASEAN, hal ini berkaitan erat dengan peran AIFS, SPA-FS, dan AFSIS yang menjadi tulang punggung koordinasi kebijakan pangan kawasan.

Relevansi penelitian ini terlihat pada dasar teoretis yang diberikan mengenai manfaat dan prasyarat koordinasi pangan regional. Temuan Kornher dan Kalkuhl membantu menjelaskan *mengapa* program seperti AIFS dan SPA-FS menjadi penting bagi Indonesia, terutama ketika menghadapi risiko krisis atau ketidakpastian pasokan. Dengan memahami kapan kerja sama regional bekerja secara optimal, penelitian ini dapat melihat implementasi AIFS bukan hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai mekanisme yang secara nyata membantu mengurangi kerentanan Indonesia terhadap dinamika pangan global.

Berikutnya pada studi literatur ketujuh berjudul ***Food Security in ASEAN: Progress, Challenges and Future***. Penelitian Sundram memberikan tinjauan menyeluruh mengenai perjalanan ASEAN dalam memperkuat ketahanan pangan sejak kerangka AIFS dan SPA-FS pertama kali diberlakukan. Ia memaparkan bahwa ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan sistem informasi pangan, mekanisme koordinasi kebijakan, serta penyusunan panduan respons darurat untuk menghadapi potensi krisis pangan. Namun, kemajuan tersebut tidak terlepas dari dinamika internal di kawasan, seperti perbedaan kapasitas produksi antarnegara, ketimpangan teknologi, serta variasi prioritas kebijakan domestik. Sundram menilai bahwa meskipun ASEAN memiliki visi bersama, implementasinya masih sangat tergantung pada kesiapan masing-masing negara anggota.

Dalam analisisnya, Sundram menekankan peran AFSIS sebagai salah satu pencapaian paling terlihat dari kerja sama ASEAN dalam ketahanan pangan. Sistem ini tidak hanya menyediakan data produksi dan distribusi pangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat peringatan dini yang membantu negara-negara anggota merespons ancaman kelangkaan atau kenaikan harga. Sundram menyatakan bahwa keberadaan sistem ini memperkuat transparansi dan akurasi informasi, yang selama bertahun-tahun menjadi kendala dalam perencanaan kebijakan pangan. Namun, ia juga mencatat bahwa efektivitas AFSIS sangat bergantung pada kualitas

data yang diberikan masing-masing negara, sehingga harmonisasi standar dan kapasitas teknis masih menjadi tantangan besar.

Penelitian ini turut membahas tantangan yang akan dihadapi ASEAN ke depan. Sundram menyoroti bahwa perubahan iklim, pertumbuhan populasi yang cepat, serta meningkatnya ketergantungan negara-negara ASEAN pada impor pangan global dapat meningkatkan risiko kerawanan pangan di masa mendatang. Dalam konteks ini, ASEAN dinilai perlu memperkuat implementasi SPA-FS, terutama pada aspek investasi pertanian, efisiensi rantai pasok, dan peningkatan cadangan pangan kawasan. Sundram juga menekankan bahwa kerja sama tidak bisa hanya berhenti pada penyusunan dokumen strategi; ia harus tercermin dalam koordinasi konkret, peningkatan kapasitas nasional, dan sinergi kebijakan lintas sektor.

Relevansi penelitian Sundram terhadap studi ini sangat kuat karena memberikan gambaran besar mengenai bagaimana AIFS dan SPA-FS bekerja dalam skala kawasan, sekaligus menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Dengan memahami dinamika kemajuan dan tantangan ASEAN, penelitian ini dapat melihat posisi Indonesia dalam konteks yang lebih luas berapa jauh Indonesia berkontribusi, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana kerja sama kawasan ini memengaruhi kebijakan pangan nasional. Studi ini membantu memperjelas bahwa ketahanan pangan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan arah kebijakan ASEAN.

Pada Literatur kedelapan berjudul *ASEAN Responses to COVID-19 for Assuring Food Security*. Penelitian Teng dan rekan-rekannya mengulas bagaimana ASEAN merespons ancaman terhadap ketahanan pangan selama pandemi COVID-19, sebuah situasi yang menguji kesiapan kawasan dalam menghadapi disrupsi rantai pasok secara tiba-tiba. Studi ini menunjukkan bahwa pandemi bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis logistik dan distribusi pangan, karena pembatasan pergerakan dan penutupan perbatasan sempat mengancam kelancaran perdagangan komoditas pokok. Teng menggambarkan bagaimana ASEAN memanfaatkan kerangka AIFS dan SPA-FS sebagai pedoman untuk menjaga arus pangan tetap bergerak, termasuk melalui jalur hijau logistik (*green lanes*), kebijakan fasilitasi perdagangan, dan koordinasi antarnegara yang lebih intensif.

Dalam penelitian ini, Teng menekankan peran AFSIS sebagai pusat informasi yang sangat penting selama masa pandemi. Ketika banyak negara mengalami ketidakpastian produksi dan distribusi, AFSIS berfungsi sebagai platform untuk memperbarui data ketersediaan pangan, stok beras, serta proyeksi kebutuhan komoditas pokok di seluruh ASEAN. Informasi ini membantu negara anggota menghindari kepanikan kebijakan seperti

penimbunan atau pembatasan ekspor yang dapat memperburuk krisis. Teng menunjukkan bahwa transparansi informasi adalah salah satu faktor yang membuat ASEAN relatif lebih stabil dibandingkan wilayah lain pada periode yang sama.

Penelitian ini juga menyoroti bagaimana kerja sama dalam AIFS dan SPA-FS memberikan struktur koordinasi yang memudahkan mobilisasi respons kawasan, termasuk pertukaran praktik terbaik, penyusunan protokol keamanan pangan, hingga diskusi rutin di tingkat kementerian untuk memastikan bahwa setiap negara tetap membuka jalur perdagangan pangan esensial. Teng menyatakan bahwa tanpa kerangka kerja ini, negara-negara ASEAN berpotensi mengambil langkah kebijakan yang saling bertentangan, seperti pembatasan ekspor mendadak, yang justru dapat menciptakan ketidakstabilan harga pangan di kawasan. Dengan adanya komitmen bersama, negara-negara ASEAN dapat menjaga agar pasokan pangan lintas batas tetap aman dan terkendali.

Temuan penelitian ini sangat relevan bagi studi saya, karena memberikan bukti nyata bagaimana AIFS dan SPA-FS diuji dalam situasi krisis besar. Dari penelitian Teng, terlihat bahwa kerja sama regional bukan hanya konsep administratif, melainkan mekanisme praktis yang mampu mencegah krisis pangan selama keadaan darurat. Pengalaman pandemi kemudian menjadi dasar penting untuk menilai sejauh mana Indonesia memanfaatkan kerja sama ASEAN dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam konteks disrupsi eksternal yang sulit diprediksi.

Literatur kesembilan berjudul *Food Security Governance: Bibliometric Mapping and Insights*. Penelitian yang dilakukan Desker melalui lembaga ERIA ini memetakan perkembangan penelitian global terkait tata kelola ketahanan pangan dengan menggunakan pendekatan bibliometrik. Studi ini mencoba melihat pola besar dalam riset ketahanan pangan: siapa aktor yang paling berperan, topik apa saja yang paling banyak dibahas, serta bagaimana tren penelitian berubah dari waktu ke waktu. Dari pemetaan ini, Desker menemukan bahwa ketahanan pangan semakin dipahami sebagai isu multidimensi yang melibatkan pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan komunitas lokal. Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa tata kelola ketahanan pangan tidak bisa hanya mengandalkan satu aktor atau satu level kebijakan saja.

Dalam analisisnya, penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama multilevel mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga regional dan global. Desker menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, kapasitas negara dalam menjaga ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi untuk bekerja sama lintas batas dan lintas sektor. Ia menekankan bahwa kelembagaan regional seperti ASEAN memainkan peran penting sebagai penghubung

koordinasi antara negara-negara anggota. Hal ini relevan dengan konteks AIFS dan SPA-FS karena keduanya dirancang sebagai kerangka tata kelola regional yang menyatukan strategi, data, dan kebijakan pangan ASEAN dalam satu sistem.

Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa tata kelola ketahanan pangan menuntut konsistensi data, sistem monitoring yang kuat, serta mekanisme komunikasi yang responsif. Desker menjelaskan bahwa tanpa data yang akurat dan aksesibel, negara akan kesulitan memahami risiko yang mungkin muncul dan membuat keputusan yang tepat waktu. Di sinilah posisi AFSIS menjadi sangat penting. Melalui pemetaan literatur, Desker menemukan bahwa sistem informasi pangan yang terintegrasi adalah kunci dari ketahanan pangan modern, dan keberadaannya sangat menentukan stabilitas regional. Temuan ini memperkuat dasar teoretis mengapa ASEAN perlu terus mengembangkan mekanisme informasi pangan yang lebih baik. Relevansi penelitian ini terhadap studi saya terlihat jelas dari bagaimana Desker menempatkan kerja sama regional sebagai bagian penting dalam tata kelola ketahanan pangan. Secara tidak langsung, studi ini membantu menjelaskan konteks akademik dari AIFS dan SPA-FS bahwa program tersebut bukan hanya kebijakan politik, tetapi bagian dari evolusi global dalam pengelolaan ketahanan pangan. Perspektif ini membantu memperkuat argumen penelitian, bahwa implementasi AIFS dan SPA-FS di Indonesia perlu dilihat dalam kerangka tata kelola yang lebih luas, bukan hanya pada aspek teknis.

Pada Literatur kesepuluh berjudul *Transaction Cost Analysis of ASEAN Food Security (Case & Implications)*. Penelitian Pinasthika menggunakan pendekatan *transaction cost analysis* untuk memahami hambatan yang muncul dalam kerja sama ketahanan pangan ASEAN. Studi ini melihat bahwa keberhasilan program seperti AIFS dan SPA-FS tidak hanya ditentukan oleh kesediaan negara-negara bekerja sama, tetapi juga oleh biaya yang muncul akibat perbedaan regulasi, prosedur administrasi, serta kompleksitas perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Pinasthika menunjukkan bahwa perbedaan standar pangan, kebijakan impor, hingga mekanisme perizinan dapat meningkatkan biaya transaksi dan pada akhirnya menghambat efektivitas kerja sama regional.

Dalam pembahasannya, Pinasthika menjelaskan bahwa tingginya biaya transaksi sering kali berdampak pada lambatnya koordinasi saat menghadapi ancaman pangan, seperti kenaikan harga atau gangguan produksi. Negara-negara yang memiliki regulasi ketat atau proses birokrasi panjang cenderung kurang responsif terhadap dinamika pasar, sehingga memperburuk stabilitas pasokan. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun ASEAN telah memiliki kerangka kerja AIFS dan SPA-FS, masih terdapat kesenjangan dalam harmonisasi

aturan yang membuat kerja sama tersebut belum berjalan optimal. Hal ini terlihat terutama dalam kasus perdagangan beras, komoditas utama yang sangat sensitif di kawasan.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa pengurangan biaya transaksi dapat meningkatkan efisiensi kerja sama regional secara signifikan. Harmonisasi standar, penyederhanaan regulasi perdagangan, serta digitalisasi proses perizinan menjadi beberapa rekomendasi yang diajukan Pinasthika untuk memperkuat implementasi ketahanan pangan ASEAN. Ia menunjukkan bahwa dengan menurunkan hambatan prosedural, negara-negara dapat menyalurkan pangan dengan lebih cepat, mengamankan pasokan komoditas strategis, dan mengurangi risiko kelangkaan. Bagi Indonesia, rekomendasi ini penting karena berhubungan langsung dengan bagaimana negara dapat memanfaatkan peluang dalam kerja sama ASEAN, terutama ketika kondisi domestik sedang tertekan.

Relevansi penelitian ini terhadap studi saya terletak pada perspektif ekonominya yang menjelaskan kendala praktis dalam implementasi AIFS dan SPA-FS. Pinasthika membantu memperjelas bahwa kerja sama ketahanan pangan bukan hanya persoalan strategi dan komitmen, tetapi juga bergantung pada kemampuan negara menurunkan biaya transaksi yang menghambat kelancaran koordinasi. Dengan memahami faktor ini, kita dapat melihat implementasi AIFS di Indonesia secara lebih realistis bahwa efektivitas program regional juga dipengaruhi oleh kesiapan institusi nasional dalam menyinkronkan aturan dan memperbaiki efisiensi birokrasi.